



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PEMBINAAN KEPEGAWAIAN JABATAN FUNGSIONAL  
INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN**

**PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 22 TAHUN 2020**

**DIUNDANGKAN : 18 DESEMBER 2020**



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBINAAN KEPEGAWAIAN JABATAN FUNGSIONAL

INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengaturan, pengawasan, pengendalian, dan investigasi di bidang navigasi penerbangan dan komponennya serta organisasi lembaga pendidikan dan pelatihan diperlukan pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 415);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEMBINAAN KEPEGAWAIAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian dan pembinaan manajemen PNS di Instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengaturan, pengawasan, pengendalian, dan investigasi di bidang navigasi penerbangan dan komponennya serta organisasi lembaga pendidikan dan pelatihan.
6. Pejabat Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan yang selanjutnya disebut Inspektur Navigasi Penerbangan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengaturan, pengawasan, pengendalian, dan investigasi di bidang navigasi penerbangan dan komponennya serta organisasi lembaga pendidikan dan pelatihan.
7. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS setiap tahun.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang

harus dicapai oleh Inspektur Navigasi Penerbangan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

9. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Inspektur Navigasi Penerbangan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
10. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan.
11. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Inspektur Navigasi Penerbangan dalam bentuk angka kredit.
12. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang pengaturan, pengawasan, pengendalian, dan investigasi di bidang navigasi penerbangan yang menyangkut aspek pengetahuan, keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
13. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
14. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Inspektur Navigasi Penerbangan sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
15. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok

pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Inspektur Navigasi Penerbangan baik perorangan atau kelompok di bidang pengaturan, pengawasan, pengendalian, dan investigasi di bidang navigasi penerbangan.

16. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
17. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI, JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan berkedudukan sebagai pejabat fungsional pengaturan, pengawasan, pengendalian, dan investigasi di bidang navigasi penerbangan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
- (2) Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.
- (3) Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan, ditetapkan

dalam peta jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penentuan berkedudukan dan bertanggungjawab secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing instansi pemerintah.
- (5) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Tugas Jabatan

### Pasal 3

Tugas Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan yaitu melaksanakan kegiatan pengaturan, pengawasan, pengendalian, dan investigasi di bidang navigasi penerbangan.

## Bagian Ketiga Kategori dan Jenjang Jabatan

### Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan ahli pertama;
  - b. Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan ahli muda; dan
  - c. Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan ahli madya.

Bagian Keempat  
Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 5

Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan, terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan ahli pertama, meliputi:
  1. pangkat penata muda, golongan ruang III/a; dan
  2. pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b;
- b. Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan ahli muda, meliputi:
  1. pangkat penata, golongan ruang III/c; dan
  2. pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d;
- c. Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan ahli madya, meliputi:
  1. pangkat pembina, golongan ruang IV/a;
  2. pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
  3. pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c.

BAB III

UNSUR KEGIATAN, SUB-UNSUR KEGIATAN,  
DAN URAIAN KEGIATAN

Bagian Kesatu  
Unsur Kegiatan

Pasal 6

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu pembinaan teknis navigasi penerbangan.

Bagian Kedua  
Subunsur Kegiatan

Pasal 7

Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. pengaturan;
- b. pengawasan;
- c. pengendalian; dan
- d. investigasi.

Bagian Ketiga  
Uraian Kegiatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan dan hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan sesuai jenjang jabatannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan.
- (2) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penilaian kinerja.

Pasal 9

- (1) Inspektur Navigasi Penerbangan dapat melaksanakan tugas yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) atau 2 (dua) tingkat di bawah jenjang jabatannya apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Inspektur Navigasi Penerbangan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (2) Perolehan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. Inspektur Navigasi Penerbangan yang melaksanakan tugas 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar

80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan

- b. Inspektur Navigasi Penerbangan yang melaksanakan tugas 1 (satu) atau 2 (dua) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan.

- (3) Inspektur Navigasi Penerbangan yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Badan ini.

## BAB IV

### KEWENANGAN PENGANGKATAN

#### Bagian Kesatu

#### Pejabat yang Berwenang Mengangkat

#### Pasal 10

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan ahli pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a sampai dengan jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan ahli madya, pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Kedua  
Pejabat yang Diberikan Kuasa

Pasal 11

Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan Inspektur Navigasi Penerbangan, kecuali bagi jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan ahli madya.

BAB V

PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGANGKATAN  
DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR  
NAVIGASI PENERBANGAN

Bagian Kesatu

Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur  
Navigasi Penerbangan

Pasal 12

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dihitung berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan.
- (2) Penghitungan analisis beban kerja yang ditentukan dari indikator sebagai berikut:
  - a. jumlah area pengendalian dan obyek area pengawasan;
  - b. ruang lingkup area pengendalian dan obyek area pengawasan; dan
  - c. tingkat resiko keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.
- (3) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kedua  
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur  
Navigasi Penerbangan

Pasal 13

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dapat dilakukan melalui:
  - a. pengangkatan pertama;
  - b. perpindahan dari jabatan lain;
  - c. penyesuaian (*inpassing*); atau
  - d. promosi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dilakukan setelah perhitungan kebutuhan jumlah Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Paragraf 1

Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan melalui pengangkatan pertama, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang pemandu lalu lintas udara, pemandu komunikasi penerbangan, teknik navigasi udara, teknik listrik bandara, penerangan informasi aeronautika, komputer, penerbangan, teknik elektro, telekomunikasi, teknik geodesi, ilmu administrasi, hukum, atau meteorologi; dan
  - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan

kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dari calon PNS.

- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan.
- (4) Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) dari salah satu *five core training*.
- (5) Dalam hal PNS yang belum diangkat ke dalam Jabatan Fungsional melebihi 1 (satu) tahun, maka tidak diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan diangkat dalam Jabatan Fungsionalnya.
- (6) Angka Kredit pada saat PNS diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 0 (nol).
- (7) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan, Angka Kredit yang dihasilkan selama melaksanakan tugas sejak calon PNS dapat diusulkan sebagai perolehan Angka Kredit Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan.
- (8) Angka Kredit Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (9) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan investigasi di bidang navigasi penerbangan.
- (10) Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan investigasi di bidang navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (9) dibuktikan dengan sertifikat.

- (11) Inspektur Navigasi Penerbangan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan investigasi di bidang navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak diberikan kenaikan jenjang jabatan.
- (12) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan disusun sesuai format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## Paragraf 2

### Perpindahan dari Jabatan Lain

## Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang pemandu lalu lintas udara, pemandu komunikasi penerbangan, teknik navigasi udara, teknik listrik bandara, penerangan informasi aeronautika, komputer, penerbangan, teknik elektro, telekomunikasi, teknik geodesi, ilmu administrasi, hukum, meteorologi, atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
  - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan investigasi di bidang navigasi penerbangan paling

- kurang 2 (dua) tahun;
- g. memiliki sertifikat *Inspector Training System* di bidang pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan investigasi di bidang navigasi penerbangan;
  - h. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - i. berusia paling tinggi:
    - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan ahli pertama dan Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan ahli muda; dan
    - 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan ahli madya.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan melalui perpindahan dari jabatan lain harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (3) Penetapan pangkat bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan melalui perpindahan dari jabatan lain sama dengan pangkat yang dimilikinya.
- (4) Penetapan jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan berdasarkan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki PNS setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
- (5) Jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Dalam hal PNS memiliki pangkat dibawah jenjang jabatan satu tingkat dapat mengikuti Uji Kompetensi untuk jenjang diatasnya apabila telah menduduki paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- (7) Pengalaman sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f

dihitung secara kumulatif paling kurang 2 (dua) tahun dan dapat digunakan untuk menambah Angka Kredit kenaikan pangkat/jenjang.

- (8) Penilaian dan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling besar 50% (lima puluh persen) dari Angka Kredit kebutuhan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi.
- (9) Penyampaian usul pengangkatan ke dalam Jabatan Inspektur Navigasi Penerbangan melalui perpindahan dari jabatan lain paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf i.
- (10) Pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (11) Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 16

- (1) Pejabat fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang memperoleh ijazah sarjana atau diploma empat dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan, dengan syarat sebagai berikut:
  - a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan;
  - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d;

- c. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - d. berusia paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf i; dan
  - e. memiliki pangkat penata muda, golongan ruang III/a.
- (2) Pejabat fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang akan diangkat menjadi Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit yang dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas sebagai pejabat fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.
  - (3) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 65% (enam puluh lima persen) yang dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan pada jenjang jabatan kategori keterampilan ditambah perolehan ijazah sesuai dengan bidang Jabatan Fungsional yang didudukinya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
  - (4) Pejabat fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang menduduki pangkat pengatur tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah yang memperoleh ijazah sarjana atau diplomat empat, sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan ditetapkan dahulu kenaikan pangkatnya menjadi penata muda, golongan ruang III/a.
  - (5) Pejabat fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang menduduki pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b ke atas yang memperoleh ijazah sarjana atau diploma, diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan ahli pertama.
  - (6) Pejabat fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling singkat 1 (satu) tahun sejak menduduki jenjang ahli

pertama dapat diangkat pada jenjang jabatan sesuai pangkat yang didudukinya setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

- (7) Pejabat fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) apabila lulus Uji Kompetensi untuk menduduki jenjang jabatan, diangkat dalam jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan ahli muda sesuai pangkat yang diduduki dengan Angka Kredit yang ditetapkan sejumlah 0 (nol).
- (8) Pengangkatan Pejabat fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan menjadi Inspektur Navigasi Penerbangan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan.
- (9) Pejabat fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang akan diangkat menjadi Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (10) PAK perpindahan dari Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan menjadi Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (11) Keputusan pengangkatan dari Pejabat fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan menjadi Inspektur Navigasi Penerbangan disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 3  
Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan melalui penyesuaian/*inpassing* harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
  - e. memiliki pengalaman di bidang pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan investigasi di bidang navigasi penerbangan paling kurang 2 (dua) tahun;
  - f. memiliki sertifikat *Inspector Training System* di bidang pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan investigasi di bidang navigasi penerbangan;
  - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan investigasi di bidang navigasi penerbangan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.
- (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (4) Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/*inpassing* ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.
- (5) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/*inpassing*, dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:

- a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
  - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
  - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
  - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
  - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
- (6) PNS yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, sebelum disesuaikan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.
- (7) PNS yang telah disesuaikan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (8) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/*inpassing*.
- (9) Keputusan pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dan disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (10) Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan, harus selesai ditetapkan paling lambat 28 April 2022.

Paragraf 4

Promosi

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan melalui promosi ditetapkan berdasarkan kriteria:
  - a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
  - b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
  - c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan melalui promosi dilaksanakan dalam hal:
  - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan; atau
  - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan satu tingkat lebih tinggi.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
  - c. memiliki rekam jejak yang baik;
  - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
  - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan melalui promosi harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.

- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan melalui promosi direkomendasikan oleh Pejabat yang Berwenang atas nama instansi dan bukan yang bersangkutan yang mengajukan.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
- (7) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Keputusan pengangkatan melalui promosi dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## BAB VI

### UJI KOMPETENSI

#### Pasal 18

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan harus memenuhi Standar Kompetensi, mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural melalui Uji Kompetensi.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan jenjang setiap jabatan dan dapat digunakan syarat pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.
- (3) Ketentuan mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama.
- (4) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Instansi Pembina.

BAB VII  
TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN  
SUMPAH/JANJI

Pasal 19

- (1) PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dapat dilakukan kepada Inspektur Navigasi Penerbangan yang mengalami kenaikan jenjang jabatan.
- (3) Inspektur Navigasi Penerbangan yang akan dilantik, diundang secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
- (4) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan.
- (5) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL DAN  
ANGKA KREDIT PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu  
Target Angka Kredit Minimal

Pasal 20

- (1) Penetapan target Angka Kredit minimal setiap tahun bagi Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan ditetapkan paling sedikit:
  - a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk

- Inspektur Navigasi Penerbangan ahli pertama;
- b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Inspektur Navigasi Penerbangan ahli muda; dan
  - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Inspektur Navigasi Penerbangan ahli madya.
- (2) Jumlah target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi Inspektur Navigasi Penerbangan ahli madya yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
  - (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Navigasi Penerbangan wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
  - (4) Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh berdasarkan kriteria penetapan standar kualitas hasil setiap butir kegiatan atau menggunakan pendekatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - (5) Penetapan target Angka Kredit minimal yang dipersyaratkan bagi Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan digunakan sebagai dasar untuk penilaian SKP.

## Bagian Kedua

### Angka Kredit Pemeliharaan

#### Pasal 21

- (1) Inspektur Navigasi Penerbangan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:
  - a. 10 (sepuluh) untuk Inspektur Navigasi Penerbangan ahli pertama; dan
  - b. 20 (dua puluh) untuk Inspektur Navigasi Penerbangan ahli muda.
- (2) Inspektur Navigasi Penerbangan ahli madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap

tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit.

## BAB IX

### PENILAIAN KINERJA DAN HUKUMAN DISIPLIN

#### Bagian Kesatu

#### Penilaian Kinerja

#### Pasal 22

Penilaian kinerja Inspektur Navigasi Penerbangan meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

#### Paragraf 1

#### SKP

#### Pasal 23

- (1) Penyusunan SKP Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. SKP Inspektur Navigasi Penerbangan disusun awal tahun akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung selaku pejabat penilai;
  - b. SKP Inspektur Navigasi Penerbangan disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan; dan
  - c. SKP Inspektur Navigasi Penerbangan diambil dari butir kegiatan yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit berdasarkan pada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.

- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (4) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (5) Hasil penilaian SKP Inspektur Navigasi Penerbangan ditetapkan sebagai capaian SKP.
- (6) Dalam rangka mendukung obyektivitas dalam penilaian kinerja, Inspektur Navigasi Penerbangan mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

#### Paragraf 2

#### Perilaku Kerja

#### Pasal 24

Perilaku kerja ditetapkan dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Hukuman Disiplin

#### Pasal 25

- (1) Inspektur Navigasi Penerbangan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).
- (2) Inspektur Navigasi Penerbangan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat apabila pencapaian sasaran kerjanya kurang dari 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PAK

Bagian Kesatu  
Pengusulan PAK

Pasal 26

- (1) Capaian SKP sebagai bahan usulan PAK disampaikan oleh atasan langsung Inspektur Navigasi Penerbangan kepada pejabat yang mengusulkan Angka Kredit melalui pimpinan unit kerja.
- (2) Bahan usulan penilaian dan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang mengusulkan Angka disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Pengusulan PAK Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
  - a. surat pernyataan melakukan kegiatan Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
  - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
  - c. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Pengusulan PAK Inspektur Navigasi Penerbangan diajukan oleh:
  - a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi

navigasi penerbangan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi navigasi penerbangan untuk Angka Kredit bagi Inspektur Navigasi Penerbangan ahli madya di lingkungan unit pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi transportasi udara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi;

- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi navigasi penerbangan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan untuk Angka Kredit bagi Inspektur Navigasi Penerbangan ahli pertama dan Inspektur Navigasi Penerbangan ahli muda di lingkungan unit pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi transportasi udara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi; dan
- c. pejabat administrator yang mempunyai otoritas mengawasi navigasi penerbangan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan untuk Angka Kredit bagi Inspektur Navigasi Penerbangan ahli pertama dan Inspektur Navigasi Penerbangan ahli muda di lingkungan kantor yang mempunyai otoritas mengawasi navigasi penerbangan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

## Bagian Kedua

### Penilaian Angka Kredit

#### Pasal 27

- (1) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan terhadap Inspektur Navigasi Penerbangan dilakukan oleh Tim Penilai, berdasarkan pada capaian SKP sebagai capaian Angka Kredit.

- (2) Capaian Angka Kredit Inspektur Navigasi Penerbangan didasarkan pada capaian SKP Inspektur Navigasi Penerbangan dipresentasikan dan dikalikan dengan target Angka Kredit SKP Inspektur Navigasi Penerbangan.
- (3) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal setiap tahun.
- (4) Dalam melakukan penilaian, Tim penilai dapat meminta bukti fisik dan laporan hasil kerja sebagai bahan pertimbangan.
- (5) Dalam melakukan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai wajib memperhatikan kesesuaian tugas Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan tugas fungsi unit kerja berdasarkan kedudukan Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan yang ditetapkan dalam peta jabatan.
- (6) Apabila diperlukan, Tim Penilai dapat melakukan konfirmasi terhadap pejabat penilai yang bersangkutan.
- (7) Hasil penilaian dan PAK Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan formulir tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

### Bagian Ketiga

#### PAK

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal capaian Angka Kredit memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat atau jabatan, capaian Angka Kredit Inspektur Navigasi Penerbangan diusulkan kepada pejabat yang menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.

- (2) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Asli PAK disampaikan kepada pimpinan instansi pengusul dan Inspektur Navigasi Penerbangan yang bersangkutan serta salinan sah disampaikan kepada:
  - a. Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit;
  - b. sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
  - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan.
- (4) PAK untuk kenaikan pangkat Inspektur Navigasi Penerbangan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
  - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
- (5) Hasil PAK Inspektur Navigasi Penerbangan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Inspektur Navigasi Penerbangan.

#### Pasal 29

- (1) Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan, yaitu:
  - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi navigasi penerbangan untuk Angka Kredit bagi Inspektur Navigasi Penerbangan ahli madya di lingkungan unit pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi transportasi udara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi; dan

- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi navigasi penerbangan untuk angka kredit bagi Inspektur Navigasi Penerbangan ahli pertama dan Inspektur Navigasi Penerbangan ahli muda di lingkungan unit pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi transportasi udara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi dan kantor yang mempunyai otoritas mengawasi navigasi penerbangan.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
  - (3) Apabila terdapat pergantian pejabat pen tetap Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
  - (4) Apabila pejabat yang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan, maka Angka Kredit ditetapkan oleh atasan pejabat pen tetap Angka Kredit.
  - (5) Dalam hal melakukan PAK, pejabat pen tetap Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

## BAB XI

### TIM PENILAI DAN TIM TEKNIS

#### Bagian Kesatu

#### Tim Penilai

#### Pasal 30

- (1) Tim Penilai Inspektur Navigasi Penerbangan yaitu Tim

Penilai untuk Angka Kredit bagi Inspektur Navigasi Penerbangan ahli pertama sampai dengan Inspektur Navigasi Penerbangan ahli madya di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

- (2) Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
- (5) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, ketua dapat mengajukan usul pengganti anggota.
- (6) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Inspektur Navigasi Penerbangan maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian kinerja Inspektur Navigasi Penerbangan.
- (7) Tim penilaian dapat membentuk tim teknis apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan Instansi Pembina.

## Bagian Kedua

### Tim Teknis

#### Pasal 31

- (1) Anggota tim teknis terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tim teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada ketua Tim Penilai dalam hal pemberian saran dan pendapat penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Pembentukan tim teknis hanya bersifat sementara

apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

## BAB XII

### KENAIKAN JABATAN, KENAIKAN PANGKAT, DAN KEBUTUHAN ANGKA KREDIT

#### Bagian Kesatu

#### Kenaikan Jabatan

#### Pasal 32

- (1) Kenaikan jabatan bagi Inspektur Navigasi Penerbangan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan:
  - a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
  - b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
  - c. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
  - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - e. memenuhi Hasil Kerja Minimal; dan
  - f. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
- (2) Kenaikan jabatan dari Inspektur Navigasi Penerbangan ahli pertama sampai dengan menjadi Inspektur Navigasi Penerbangan ahli madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Inspektur Navigasi Penerbangan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya.
- (4) Inspektur Navigasi Penerbangan yang memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, Angka Kredit selanjutnya diperhitungkan sebesar 0 (nol).
- (5) Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

### Pasal 33

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, Inspektur Navigasi Penerbangan dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memperoleh ijazah/gelar pendidikan formal sesuai tugas bidang pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan investigasi di bidang navigasi penerbangan;
  - b. menyusun karya tulis/karya ilmiah di bidang pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan investigasi di bidang navigasi penerbangan;
  - c. menerjemahkan/menyadur buku dan karya ilmiah di bidang pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan investigasi di bidang navigasi penerbangan;
  - d. menyusun pedoman/petunjuk teknis di bidang pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan investigasi di bidang navigasi penerbangan;
  - e. melatih/mengembangkan kompetensi di bidang pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan investigasi di bidang navigasi penerbangan; dan
  - f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan di bidang pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan investigasi di bidang navigasi penerbangan.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan.
- (4) Bagi Inspektur Navigasi Penerbangan yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Inspektur

Navigasi Penerbangan, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebanyak 6 (enam) Angka Kredit.

- (5) Angka Kredit dari pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan sebelumnya.
- (6) Kegiatan pengembangan profesi Inspektur Navigasi Penerbangan, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 34

- (1) Inspektur Navigasi Penerbangan yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan investigasi di bidang navigasi penerbangan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
  - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
  - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
  - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Kedua  
Kenaikan Pangkat

Pasal 35

- (1) Kenaikan pangkat Inspektur Navigasi Penerbangan, dapat dipertimbangkan apabila:
  - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
  - b. memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
  - c. setiap unsur penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - d. memperoleh Hasil Kerja Minimal setiap periode.
- (2) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan ahli madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan ahli pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a untuk menjadi penata muda tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Inspektur Navigasi Penerbangan ahli madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Kenaikan pangkat bagi Inspektur Navigasi Penerbangan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat apabila telah ditetapkan kenaikan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Inspektur Navigasi Penerbangan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama, kelebihan Angka Kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (6) Inspektur Navigasi Penerbangan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (7) Kenaikan pangkat bagi Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 36

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat Inspektur Navigasi Penerbangan dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
  - a. mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan investigasi di bidang navigasi penerbangan;
  - b. menjadi anggota dalam tim penilai;
  - c. memperoleh penghargaan/tanda jasa;
  - d. melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan; atau
  - e. memperoleh gelar/ijazah lain.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan

untuk kenaikan pangkat.

- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.
- (4) Penilaian dari kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga  
Kebutuhan Angka Kredit untuk Kenaikan  
Pangkat atau Jabatan

Pasal 37

- (1) Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Inspektur Navigasi Penerbangan, yaitu:
  - a. Inspektur Navigasi Penerbangan ahli pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
  - b. Inspektur Navigasi Penerbangan ahli pertama, pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata, golongan ruang III/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
  - c. Inspektur Navigasi Penerbangan ahli muda, pangkat penata, golongan ruang III/c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
  - d. Inspektur Navigasi Penerbangan ahli muda, pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat

- pembina, golongan ruang IV/a, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
- e. Inspektur Navigasi Penerbangan ahli madya, pangkat pembina, golongan ruang IV/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh);
  - f. Inspektur Navigasi Penerbangan ahli madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh); dan
  - g. Inspektur Navigasi Penerbangan ahli madya, pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh).
- (2) Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jabatan Inspektur Navigasi Penerbangan, yaitu:
- a. Inspektur Navigasi Penerbangan ahli pertama yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Inspektur Navigasi Penerbangan ahli muda, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b; dan
  - b. Inspektur Navigasi Penerbangan ahli muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Inspektur Navigasi Penerbangan ahli madya, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d.

BAB XIII  
PENGEMBANGAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

Pasal 38

- (1) Inspektur Navigasi Penerbangan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi yang bersangkutan.
- (2) Pengembangan kompetensi bagi Inspektur Navigasi Penerbangan dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Inspektur Navigasi Penerbangan antara lain berupa:
  - a. pelatihan fungsional; dan
  - b. pelatihan teknis bidang pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan investigasi di bidang navigasi penerbangan.
- (4) Pelatihan yang diberikan bagi Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (5) Selain pelatihan, Inspektur Navigasi Penerbangan dapat mengembangkan kompetensi melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (6) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa kegiatan:
  - a. mempertahankan kompetensi sebagai Inspektur Navigasi Penerbangan (*maintain rating*);
  - b. seminar;
  - c. lokakarya (*workshop*);
  - d. konferensi; atau
  - e. pendidikan latihan lainnya.
- (7) Ketentuan mengenai pelatihan, pengembangan kompetensi, dan penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional bagi Inspektur Navigasi Penerbangan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XIV  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu  
Pemberhentian

Pasal 39

- (1) Inspektur Navigasi Penerbangan diberhentikan dari jabatannya, apabila:
  - a. mengundurkan diri dari jabatan;
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana; atau
  - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Inspektur Navigasi Penerbangan.
- (3) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
  - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan; atau
  - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi.
- (4) Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan Pemberhentiannya.
- (5) Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua  
Pengangkatan Kembali

Pasal 40

- (1) Inspektur Navigasi Penerbangan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan.
- (2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada (1), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan selama diberhentikan.
- (3) Inspektur Navigasi Penerbangan yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling lama 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.
- (4) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 2020

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1549

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Lili Leli Kurniatri

LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBINAAN KEPEGAWAIAN JABATAN FUNGSIONAL  
INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

1. CONTOH PELAKSANAAN TUGAS

- a. Inspektur Navigasi Penerbangan Yang Melaksanakan Tugas Satu Tingkat di Atas Jenjang Jabatannya.

Sdr. Guntur Wira Yudha, NIP. 197204021993031003, Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pada Kementerian Perhubungan. Pegawai yang bersangkutan ditugaskan untuk mengembangkan standar dan rekomendasi praktis di bidang navigasi penerbangan, dengan output laporan hasil pengembangan standar dan rekomendasi praktis di bidang navigasi penerbangan dengan Angka Kredit 0,120 Kegiatan dimaksud merupakan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Madya. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar  $80\% \times 0,120 = 0,096$  Angka Kredit.

- b. Inspektur Navigasi Penerbangan Yang Melaksanakan Tugas Satu Tingkat Di Bawah Jenjang Jabatannya.

Sdri. Sarah Nursalita, NIP. 19750617199512101, Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada kementerian perhubungan, yang bersangkutan ditugaskan untuk menyusun konsep kompilasi standar dan rekomendasi praktis bidang navigasi penerbangan dengan output laporan hasil kompilasi bahan standar dan rekomendasi praktis bidang navigasi Angka Kredit 0,092 Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Pertama. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar  $100\% \times 0,092 = 0,092$  Angka Kredit.

2. CONTOH PERPINDAHAN JABATAN LAIN

- a. Penetapan Jenjang Jabatan Bagi PNS Yang Diangkat Dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain.

- 1) Pejabat Fungsional yang memiliki pangkat terendah pada jenjang jabatannya.

Sdr. M Riza Semaryan Lubis, NIP. 197906102005031001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, menduduki jabatan Inspektur Navigasi Penerbangan Level IV yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Muda melalui perpindahan jabatan lain.

Maka untuk menetapkan jenjang jabatannya pegawai yang bersangkutan mengikuti dan lulus Uji Kompetensi pada pangkat Penata, golongan ruang III/c.

Setelah lulus Uji Kompetensi Sdr. M Riza Semaryan Lubis diberikan angka kredit sebesar 0 (nol) yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

- 2) Pejabat Fungsional pangkat tertinggi pada jenjang jabatannya.

Sdri. Dina Yunita, NIP. 197605042004032001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Kepala Seksi Manajemen Informasi Aeronautika, Meteorologi dan Pencarian Pertolongan Pegawai yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Muda melalui perpindahan jabatan lain.

Maka untuk menetapkan jenjang jabatannya pegawai yang bersangkutan mengikuti dan lulus Uji Kompetensi pada pangkat Penata, golongan ruang III/d.

Setelah lulus Uji Kompetensi Sdri. Dina Yunita diberikan Angka Kredit Dasar sebesar 100 (seratus) yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

- b. Pengalaman Dapat Digunakan Untuk Menambah Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jenjang.

Sdr. M Riza Semaryan Lubis, NIP. 197509102003031001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, menduduki jabatan Inspektur Navigasi Penerbangan Level IV.

Selama menjabat menjadi Inspektur Navigasi Penerbangan Level IV yang bersangkutan melakukan kegiatan tugas jabatan dengan Angka Kredit sebesar 18,64 (delapan belas koma enam puluh empat) Angka Kredit terdiri dari:

**CONTOH MATRIKS  
PENGHITUNGAN KEGIATAN TUGAS JABATAN DARI PENGALAMAN KERJA**

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SATUAN HASIL</b>	<b>AK PERBUTIR</b>	<b>VOLUME</b>	<b>JUMLAH AK (4X5)</b>
1	2	3	4	5	6
1.	Mengembangkan standar dan rekomendasi praktis di bidang navigasi penerbangan	laporan hasil pengembangan standar dan rekomendasi praktis di bidang navigasi penerbangan	0.120	10	1.2
2.	Menganalisis bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis bidang navigasi	laporan hasil analisa kompilasi bahan standar dan rekomendasi praktis bidang navigasi	0.200	20	4
3.	Merumuskan rancangan standar dan rekomendasi praktis bidang navigasi penerbangan	laporan hasil perumusan rancangan standar dan rekomendasi praktis bidang navigasi penerbangan	0.207	20	4.14
4.	Memverifikasi manual operasi (unit pelayanan) sertifikasi penyelenggara pelayanan peta penerbangan	laporan hasil verifikasi manual operasi (unit pelayanan) sertifikasi penyelenggara pelayanan peta penerbangan	0.300	8	2.4
5.	Mengevaluasi dokumen laporan hasil <i>safety assessment</i> penyelenggara pelayanan	laporan hasil evalausi dokumen laporan hasil <i>safety assessment</i> penyelenggara pelayanan	0.330	10	3.3
6.	Melaksanakan <i>assessment</i> calon <i>Designated Representative</i>	hasil <i>assessment</i> calon <i>Designated Representative</i>	0.24	15	3,6
<b>JUMLAH AK</b>					<b>18.64</b>

Maka Sdr. M Riza Semaryan Lubis, diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Muda dengan didasarkan pada masa pengalaman paling kurang 2 (dua) sebesar 18,64 (delapan belas koma enam puluh empat) Angka Kredit ditambah Angka Kredit awal sebesar nol (0). Dalam hal demikian, Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebesar  $18,64 + 0 = 18,64$  Angka Kredit.

- c. Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit Paling Besar 50% Dari Angka Kredit Kenaikan Jabatan/Pangkat.

Sdr. Tian Kusdinar, NIP. 197906102008031001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, menduduki Jabatan Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Penerbangan.

Selama menjabat menjadi Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Penerbangan yang bersangkutan melakukan kegiatan bidang navigasi penerbangan dengan Angka Kredit sebesar 88 Angka Kredit.

Maka Sdr. Tian Kusdinar diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan Penyelia pangkat Penata, golongan ruang III/c, Angka Kredit kebutuhan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi adalah 100, dan Angka Kredit pengalaman diberikan 50% dari 100, sehingga  $100 \times 50\% = 50$  (lima puluh), maka Sdr. Tian Kusdinar yang memiliki 88 Angka Kredit pengalaman hanya di berikan 50 Angka Kredit ditambah dengan Angka Kredit Dasar sebesar 0 (nol).

Dalam hal demikian, Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebesar  $50 + 0 = 50$  (lima puluh) Angka Kredit.

- d. Penyampaian Usul Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain Paling Lambat 6 (enam) Bulan Sebelum Batas Usia Sebagaimana Dipersyaratkan.

Sdr. Indra Gunawan, NIP. 196806101994031001, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, menduduki jabatan Kepala Bidang Operasi Navigasi Penerbangan.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan untuk menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Madya, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Desember 2024 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Mei 2022, mengingat yang bersangkutan lahir bulan Juni 1968.

3. CONTOH PENGANGKATAN ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

a. Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Golongan II

Sdri. Susiana NIP. 198803102008032001, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, menduduki jabatan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dan memperoleh Ijazah S-1 di bidang Pemandu Komunikasi Penerbangan.

Maka Sdri. Susiana, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Pertama dengan ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a dan telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

Selama menduduki Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Terampil, yang bersangkutan telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 15 (lima belas) Angka Kredit, sehingga Angka Kredit ditetapkan dari tugas jabatan pada Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Terampil adalah  $65\% \times 15 = 9,75$ , ditambah 25% dari Angka Kredit Kenaikan Pangkat jenjang Terampil yang merupakan kegiatan pengembangan profesi yaitu pendidikan Sarjana (S1), adalah  $25\% \times 20 = 5$  Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Sdri. Susiana, diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Pertama dengan jumlah keseluruhan yakni sebesar  $9,75 + 5 = 14,75$  (empat belas koma tujuh puluh lima) Angka Kredit.

b. Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Golongan III

Sdr. Sutomo Hidayat, NIP. 199707132012021001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/c, menduduki jabatan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Penyelia dan memperoleh Ijazah D-IV di bidang Teknis Listrik Bandara.

Selama menduduki Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Penyelia, yang bersangkutan telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80 (delapan puluh) Angka Kredit, sehingga Angka Kredit ditetapkan dari tugas jabatan pada Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan adalah  $65\% \times 80 = 52$ , ditambah 25% dari Angka Kredit Kenaikan Pangkat jenjang Penyelia yang merupakan kegiatan pengembangan profesi yaitu pendidikan Sarjana (S1), adalah  $25\% \times 100 = 25$  Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Sdr. Sutomo Hidayat, diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Pertama jumlah keseluruhan yakni sebesar  $52 + 25 = 77$  (tujuh puluh tujuh) Angka Kredit.

4. CONTOH PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

a. Capaian Angka Kredit Berdasarkan Capaian SKP

Sdr. Muh Khasbi L, NIP. 197504211999031001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Muda.

Target Angka Kredit dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Muda adalah 25 Angka Kredit. Sdr. Muh Khasbi L mempunyai target Angka kredit sebesar 27,87 Angka Kredit dengan capaian SKP yang dinilai oleh atasan langsungnya adalah sebesar 89,24. Dalam hal demikian, maka penilaian capaian Angka Kredit adalah sebagai berikut:

$$89,24 \times 100\% = 89,24\%$$

$$89,24\% \times 27,87 = 24,87 \text{ Angka Kredit}$$

Penilaian capaian Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam contoh formulir berikut:

PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT  
BERDASARKAN CAPAIAN SKP  
Nomor .....

Inspektur Navigasi Penerbangan Yang Dinilai					
1.	NAMA	: Muh Khasbi L			
2.	NIP	: 197504211999031001			
3.	NOMOR SERI KARPEG	: -			
4.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	: Jakarta, 21 Juni 1975			
5.	JENIS KELAMIN	: Laki-Laki			
6.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	: Penata Tingkat I, III/d / 1 April 2019			
7.	JABATAN/TMT	: Inspektur Navigasi Penerbangan			
8.	UNIT KERJA	:			
HASIL PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT					
TAHUN	TARGET AK SKP	NILAI CAPAIAN TUGAS JABATAN	PERSENTASE	ANGKA KREDIT MINIMAL YANG HARUS DICAPAI SETIAP TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT (Kolom 2 x Kolom 4)
1	2	3	4	5	6
2020	27.87	89.24	89.24%	25	24.87
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH BERDASARKAN CAPAIAN SKP					24.87

.....  
Ketua Tim Penilai

.....  
NIP. ....

- b. Capaian Angka Kredit Paling Tinggi 150% (Seratus Lima Puluh Persen) Dari Target Angka Kredit Minimal Setiap Tahun.

Sdr. Muh Khasbi L, NIP. 198404112012011001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Muda. Target minimal per tahunnya sejumlah 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Dengan demikian, capaian Angka Kredit paling tinggi adalah  $150\% \times 25 = 37,5$  Angka Kredit.

#### 5. CONTOH KENAIKAN PANGKAT INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

- a. Kenaikan Pangkat Dalam Jenjang Jabatan Yang Lebih Tinggi.

Sdr. Muhammad Yusuf Romi Syahfitri, NIP. 197905052004041001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Muda pada tahun 2021.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2025, Sdr. Muhammad Yusuf Romi Syahfitri, memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 153,4 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2025. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Madya.

- b. Inspektur Navigasi Penerbangan Yang Memiliki Angka Kredit Melebihi Angka Kredit Yang Ditentukan Dapat Diperhitungkan Untuk Kenaikan Pangkat Setingkat Lebih Tinggi Pada Jenjang Tersebut.

Sdri. Dewi Larasati, NIP. 198204192008042010, pangkat Penata, golongan ruang III/c, Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Muda. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 112,5 (seratus dua belas koma lima). Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yaitu 100 Angka Kredit. Dengan demikian Sdri. Dewi Larasati, memiliki kelebihan 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk perolehan AK berikutnya.

- c. Inspektur Navigasi Penerbangan Yang Memiliki Angka Kredit Melebihi Angka Kredit Yang Ditentukan Tidak Dapat Diperhitungkan Untuk Kenaikan Pangkat Setingkat Lebih Tinggi Pada Jenjang Jabatan Yang Lebih Tinggi.

Sdri. Linda Meliani, NIP. 198204192008042010, pangkat Penata

Tingkat I, golongan ruang III/d, Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Muda. Pada waktu naik pangkat menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 212,5 (dua ratus dua belas koma lima).

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yaitu 200 Angka Kredit. Dengan demikian Sdri. Linda Meliani, memiliki kelebihan 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit dan tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Julia Leli Kurniatri

LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBINAAN KEPEGAWAIAN JABATAN FUNGSIONAL  
INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

1. CONTOH FORMULIR  
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN  
MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR .....  
TENTANG  
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM  
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa Saudara ..... NIP ..... pangkat/golongan ruang  
....., jabatan ..... telah memenuhi syarat dan  
dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi  
Penerbangan jenjang Ahli Pertama;  
b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu  
mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Inspektur  
Navigasi Penerbangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai  
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17  
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun  
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional  
Inspektur Navigasi Penerbangan;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 22  
Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Inspektur  
Navigasi Penerbangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : PNS dibawah ini:  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
d. Unit kerja : .....  
Terhitung mulai tanggal ..... diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur  
Navigasi Penerbangan jenjang Ahli Pertama dengan Angka Kredit sebesar 0 (nol).  
KEDUA : ..... \*\*)  
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan  
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
**Asli** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan  
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian  
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;\*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/  
Bagian Keuangan yang bersangkutan;\*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

2. CONTOH:  
PENETAPAN ANGKA KREDIT DASAR

PENETAPAN ANGKA KREDIT DASAR

<b>KATEGORI</b>	<b>JENJANG</b>	<b>PANGKAT</b>	<b>ANGKA KREDIT</b>
KEAHLIAN	Ahli Madya	IV/c	0
		IV/b	150
		IV/a	0
	Ahli Muda	III/d	100
		III/c	0
	Ahli Pertama	III/b	50
		III/a	0

3. CONTOH:  
KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI  
JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR .....  
TENTANG  
PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN  
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara .....  
NIP ..... jabatan ..... pangkat/golongan ruang ..... telah  
memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional  
Inspektur Navigasi Penerbangan melalui perpindahan dari jabatan lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai  
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17  
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun  
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional  
Inspektur Navigasi Penerbangan;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun  
2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi  
Penerbangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat:  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
d. Unit kerja : .....  
Terhitung mulai tanggal ..... diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur  
Navigasi Penerbangan jenjang ..... dengan Angka Kredit sebesar ..... (.....)  
KEDUA : .....\*\*)  
KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan  
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
**Asli** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan  
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian  
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;\*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/  
Bagian Keuangan yang bersangkutan\*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

4. CONTOH:  
PENETAPAN ANGKA KREDIT DARI KATEGORI  
KETERAMPILAN KE KATEGORI KEAHLIAN

PENETAPAN ANGKA KREDIT  
NOMOR .....

Instansi: .....

Masa Penilaian:.....

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	:			
2	NIP	:			
3	Nomor Seri KARPEG	:			
4	Pangkat/Golongan ruang TMT	:			
5	Tempat dan Tanggal lahir	:			
6	Jenis Kelamin	:			
7	Pendidikan	:			
8	Jabatan Fungsional/TMT	:			
9	Masa Kerja Golongan	:			
10	Unit Kerja	:			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
	1. AK yang diperoleh dari Tugas Jabatan Keterampilan				65%
	2. AK yang diperoleh dari Pengembangan Profesi (Ijazah)				25% dari AK Kenaikan Pangkat
	<b>TOTAL ANGKA KREDIT</b>				
Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat/jabatan					
III	DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN JENJANG ..... PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....				

**ASLI** penetapan Angka Kredit untuk:

1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan
2. Inspektur Navigasi penerbangan yang bersangkutan.

Ditetapkan di

.....

Pada tanggal

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan\*);

Nama Lengkap

NIP.

.....

\*) coret yang tidak perlu

5. CONTOH:  
PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN  
INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN KE DALAM  
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR .....  
TENTANG  
PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI  
PENERBANGAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara .....  
NIP ..... jabatan ..... pangkat/golongan ruang ..... telah memenuhi  
syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional  
Inspektur Navigasi Penerbangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai  
Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17  
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11  
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Jabatan  
Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2020  
tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Inspektur  
Navigasi Penerbangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat:

- a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
d. Unit kerja : .....

Terhitung mulai tanggal ..... diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur  
Navigasi Penerbangan jenjang ..... dengan angka kredit sebesar 0 (nol).

KEDUA : .....\*\*)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,  
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Asli** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang  
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian  
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;\*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/  
Bagian Keuangan yang bersangkutan\*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Dicoret yang tidak perlu.

\*\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

6. CONTOH:  
KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN (*INPASSING*)  
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR .....  
TENTANG  
PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN (*INPASSING*)  
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara .....  
NIP ..... jabatan ..... pangkat/golongan ruang .....  
telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan  
Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan melalui penyesuaian (*inpassing*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai  
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Jabatan  
Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 22  
Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional  
Inspektur Navigasi Penerbangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat:  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
d. Unit kerja : .....  
Terhitung mulai tanggal ..... diangkat dalam Jabatan Fungsional  
Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang ..... dengan angka kredit  
sebesar ..... (.....)
- KEDUA : .....\*\*)
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,  
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
**Asli** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang  
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian  
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan\*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/  
Bagian Keuangan yang bersangkutan\*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

7. CONTOH:  
KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

KEPUTUSAN  
MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR .....  
TENTANG  
PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI  
DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara .....  
NIP ..... jabatan ..... pangkat/golongan ruang  
..... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam  
Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan melalui promosi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai  
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Jabatan  
Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 22  
Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawian Jabatan Fungsional  
Inspektur Navigasi Penerbangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : mengangkat:  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....  
d. Unit Kerja : .....  
Terhitung mulai tanggal ..... dipromosikan dalam Jabatan Fungsional  
Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang ..... dengan Angka Kredit  
sebesar ..... (.....)
- KEDUA : .....\*\*)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,  
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
**Asli** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang  
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian  
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;\*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/  
Bagian Keuangan yang bersangkutan\*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

8. CONTOH:  
SURAT PENYAMPAIAN BAHAN USULAN  
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT  
BAGI INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

Kepada Yth.

Pejabat Pengusul Angka Kredit

Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan

Di

Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-nama Pejabat Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan bukti fisiknya, sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA
1				
2				
3				
Dst.				

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

....., .....

Pimpinan Unit Kerja \*)

.....

NIP. ....

\*) tulis nama jabatannya

9. CONTOH:  
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN  
KEGIATAN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan Inspektur Navigasi Penerbangan, sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Atasan Langsung

NIP.....

10. CONTOH:  
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN  
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Atasan Langsung

NIP.....

11. CONTOH:

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

Atasan Langsung

NIP.....

12. CONTOH:

PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT BERDASARKAN CAPAIAN SKP

PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT  
BERDASARKAN CAPAIAN SKP  
NOMOR .....

INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN YANG DINILAI					
1.	NAMA		:		
2.	NIP		:		
3.	NOMOR SERI KARPEG		:		
4.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR		:		
5.	JENIS KELAMIN		:		
6.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT		:		
7.	JABATAN/TMT		:		
8.	UNIT KERJA		:		
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT					
TAHUN	TARGET AK SKP	NILAI CAPAIAN TUGAS JABATAN	PERSENTASE	ANGKA KREDIT MINIMAL YANG HARUS DICAPAI SETIAP TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT (Kolom 2 x Kolom 4)
1	2	3	4	5	6
...					
...					
...					
...					
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH BERDASARKAN CAPAIAN SKP					

.....  
Ketua Tim Penilai

.....  
NIP. ....

13. CONTOH:  
PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT  
NOMOR .....

Instansi: .....

Masa Penilaian: .....

I KETERANGAN PERORANGAN						
	1	Nama	:			
	2	NIP	:			
	3	Nomor Seri KARPEG	:			
	4	Pangkat/Golongan ruang TMT	:			
	5	Tempat dan Tanggal lahir	:			
	6	Jenis Kelamin	:			
	7	Pendidikan	:			
	8	Jabatan Fungsional/TMT	:			
	9	Masa Kerja Golongan	:			
	10	Unit Kerja	:			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
	1. AK Dasar yang diberikan					
	2. AK yang diperoleh dari Pengalaman					
	3. AK yang diperoleh Kegiatan Tugas Jabatan					
	4. AK yang diperoleh dari Pengembangan Profesi					
	5. AK yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang					
	<b>TOTAL ANGKA KREDIT</b>					
Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat/jabatan						
III	DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI ..... JENJANG ..... PANGKAT/GOLONGAN RUANG .....					

**ASLI** penetapan Angka Kredit untuk:

1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan
2. Inspektur Navigasi Penerbangan yang bersangkutan.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan\*);

Nama Lengkap

NIP. ....

\*) coret yang tidak perlu

14. CONTOH:  
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR .....  
TENTANG  
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Inspektur Navigasi Penerbangan yang lowong, Saudara ....., NIP ....., jabatan ....., pangkat/golongan ruang ....., telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
d. Unit kerja : .....  
Dari Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang ..... ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang ..... dengan angka kredit sebesar 0 (nol).
- KEDUA : .....\*\*)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
**Asli** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan\*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan\*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Dicoret yang tidak perlu

\*\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu

15. CONTOH:  
FORMULIR PENILAIAN ANGKA KREDIT DARI PENGEMBANGAN PROFESI  
DAN KEGIATAN PENUNJANG

PENILAIAN ANGKA KREDIT DARI PENGEMBANGAN PROFESI  
DAN KEGIATAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL  
INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

1.	NAMA	:	
2.	NIP	:	
3.	NOMOR SERI KARPEG	:	
4.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	:	
5.	JENIS KELAMIN	:	
6.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	:	
7.	JABATAN/TMT	:	
8.	UNIT KERJA	:	
<b>Hasil Penilaian Angka Kredit dari Pengembangan Profesi dan Kegiatan Penunjang</b>			
I. Pengembangan Profesi	Kegiatan	Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit
A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas JF	.....	Ijazah/ Gelar	
B. Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang JF	.....	Naskah	
C. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang JF	.....	Buku/ Naskah	
D. Penyusunan Standar/Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang JF	.....	Buku	
E. Pengembangan Kompetensi di bidang JF	.....	Sertifikat /laporan	
F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang JF	.....	Laporan	
<b>JUMLAH ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI</b>			
II. Penunjang			
A. Pengajar/Pelatih/ Pembimbing di bidang JF	.....	Laporan	
B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	.....	Laporan	
C. Perolehan Penghargaan	.....	Piagam/ Sertifikat	
D. Perolehan gelar/kesarjanaan lainnya	.....	Ijazah	
E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas JF	.....	Laporan	
<b>JUMLAH ANGKA KREDIT KEGIATAN PENUNJANG</b>			

Ketua Tim Penilai,

.....

16. CONTOH:  
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL  
INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR .....  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL  
INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat ..... Nomor ..... tanggal ..... perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan karena .....;\*)  
b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... diberhentikan dari Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan:  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....  
d. Jabatan : .....  
e. Unit Kerja : .....
- KEDUA : .....\*\*)  
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
**Asli** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....  
Pada tanggal .....

.....

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;\*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan\*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

17. CONTOH:  
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN  
MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR .....  
TENTANG  
PENGANGKATAN KEMBALI  
DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : bahwa Saudara ....., NIP ....., pangkat/golongan ruang ..... jabatan....., telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
d. Unit kerja : .....  
Dalam jabatan Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....).
- KEDUA : .....\*\*)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. **Asli** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;\*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/

Bagian Keuangan yang bersangkutan\*);  
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Dicoret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



  
Julia Leli Kurniatri